**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pada mulanya hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah Negara yang tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para pengusaha dalam satu wilayah negara saja, tetapi juga dengan para pedagang dari negara lain, tidak terkecualiASEAN. Bahkan hubungan-hubungan dagang tersebut semakin beraneka ragam, termasuk cara pembayarannya. Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu Negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial.Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.  secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan  atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu antara negara-negara yang terdapat didunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut.[[1]](#footnote-2)

Kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis.Kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi ajang persaingan pengaruh kekuatan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Salah satu bukti persaingan antarnegara adidaya dan kekuatan besar pada waktu itu adalah Perang Vietnam antara Vietnam Utara yang didukung kekuatan Komunis dan Vietnam Selatan yang didukung kekuatan Barat pimpinan Amerika Serikat. Persaingan dua blok tersebut menyeret negaranegara di kawasan ASEAN menjadi basis kekuatan militer Blok Komunis dan Barat. Blok Komunis di bawah komando Uni Soviet menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan Blok Barat di bawah komando Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Filipina.Selain terjadi persaingan di bidang ideologi antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur, juga terjadi konflik militer di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan tiga negara, yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam konflik bilateral, seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Vietnam; dan konflik internal, seperti di Kamboja, Thailand, dan Indonesia.[[2]](#footnote-3)

Meskipun mengalami kegagalan, upaya dan inisiatif tersebut telah mendorong para pemimpin di kawasan untuk membentuk suatu organisasi kerja sama di kawasan yang lebih baik. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melakukan berbagai pertemuan konsultatif secara intens sehingga disepakati suatu rancangan Deklarasi Bersama (Joint Declaration) yang isinya mencakup, antara lain, kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik dan membina kerja sama yang bermanfaat di antara negaranegara di kawasan yang terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.

Untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1967, bertempat di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/ Pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu para Menteri Luar Negeri Indonesia – Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia – Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina – Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura – S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand – Thamat Khoman melakukan pertemuan dan menandatangani Deklarasi ASEAN (The ASEAN Declaration) atau Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration).

Deklarasi Bangkok tersebut menandai berdirinya suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN). Organisasi ini pada awalnya bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, dan membentuk kerja sama di berbagai bidang kepentingan bersama.

Lambat laun organisasi ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan di bidang politik dan ekonomi, seperti disepakatinya Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ZOPFAN) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 lima negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC) yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Hal ini mendorong negara-negara di Asia Tenggara lainnya bergabung menjadi anggota ASEAN.

Proses penambahan keanggotaan ASEAN sehingga anggotanya 10 negara adalah sebagai berikut:

a. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) di Jakarta, Indonesia.

b. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada tanggal 29-30 Juli 1995 dalam Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

c. Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN tanggal 23-28 Juli 1997 dalam pada Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia.

d. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi, Vietnam

Dengan diterimanya Kamboja sebagai anggota ke-10 ASEAN, cita-cita para pendiri ASEAN yang mencakup sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.[[3]](#footnote-4)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu bentuk realisasi integrasi ekonomi dimana ini merupakan agenda utama negara ASEAN 2020.Adapun visi dari ASEAN tersebut adalah aliran bebas barang (free flow of goods) dimana tahun 2015 perdagangan barang dapat dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik tarif maupun non-tarif.Selain itu untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang berintegrasikan dalam membangun ekonomi yang merata dan dapat pula mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Namun pada tahun 2003 Deklarasi ASEAN Concord II, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah komunitas atau masyarakat ASEAN pada tahun 2020 yang terdiri dari 3 pilar, yakni Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Kemudian pada tahun 2007, mereka memutuskan untuk mempercepat terciptanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Dimana untuk para pemimpin ASEAN setuju bahwa proses integrasi ekonomi regional di percepat dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2007 agar di bentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Sebenarnya pernyataan di atas juga sudah pernah dijelaskan pada tahun 1998 di Ha Noi, Vietnam yang mengemukakan bahwa ASEAN bertujuan untuk Universitas Sumatera Utara 19 menciptakan kawasan yang sejahtera dan sangat kompetitif dimana terdapat arus barang, jasa, dan modal yang berintegrasi di ASEAN. Namun adapun tujuan utama MEA 2015 adalah untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang setara dengan negara anggota-anggota ASEAN dan untuk membuat ASEAN menjadi sebuah kawasan ekonomi yang sangat kompetitif yang akan sepenuhnya dapat terintegrasi dalam ekonomi global (**Tulus T.H.Tambunan: 2013**).

ASEAN juga memiliki Cetak Biru sebagai peta jalan (road map) untuk membentuk Komunitas ASEAN 2015. Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dilandaskan pada 3 (tiga) pilar Cetak Biru, yaitu Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community Blueprint), Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint), dan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint).

Untuk mencapai terbentuknya Komunitas ASEAN 2015, ASEAN menyusun Cetak Biru (Blue Print) dari ketiga pilar tersebut.Cetak Biru Komunitas ASEAN tersebut merupakan pedoman arah pembentukan Komunitas ASEAN di tiga pilar.Dari ketiga pilar tersebut, Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN disahkan pada KTT ASEAN ke-13 tahun 2007 di Singapura. Selanjutnya Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN dan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN disahkan pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009 di Cha Am Hua Hin, Thailand. Di samping itu, pada KTT tersebut para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN juga menandatangani Deklarasi Cha-am Hua Hin Mengenai Peta Jalan Pembentukan Komunitas ASEAN 2009-2011 [Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (2009-2011).[[4]](#footnote-5)

MEA berinisiatif agar negara-negara anggota ASEAN dapat mempromosikan pergerakan bebas barang, jasa-jasa, investasi, dan pekerja terdidik lintas kawasan ASEAN. Upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan ASEAN sebagai kawasan dengan aliran bebas barang dalam MEA merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari agenda yang sebelumnya pernah dilaksanakan yaitu Preferential Trading Arrangement (PTA) pada tahun 1977 dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. Adapun perbandingan yang dapat kita lihat dari ketiga agenda tersebut adalah bahwa PTA dan AFTA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan tarif, sedangkan untuk MEA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan non-tarif (**Sjamsul Arifin dkk, 2008:71**).

Dengan adanya MEA 2015 akan dapat mendorong terciptanya pembangunan jaringan-jaringan kerja produksi dan juga akan memperkuat integrasi regional pada sektor-sektor ekonomi dan dapat juga terciptanya pergerakan bebas pelaku-pelaku usaha dan tenaga kerja yang terdidik dan berwawasan. Selain itu sistem perdagangan dan syarat-syarat pabean dapat terstandardisasi dan sederhana diharapkan dapat mengurangi biaya-biaya transaksi antara sesama negara anggota ASEAN. Penerapan MEA 2015 ini juga akanmentransformasikan ASEAN ke sebuah pasar tunggal yang berbentuk basis produksi, seperti Masyarakat Eropa (ME). Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN tersebut memiliki lima pilar liberalisasi sebagai kerangka kerja MEA 2015 yang meliputi: liberalisasi arus barang, arus jasa, arus investasi, arus modal, dan pasar tenaga kerja. Dalam arus inevastasi dan Jasaini sudah jelas akan dapat mempengaruhi arus inevastasi dan Jasa dari masing-masing negara anggota ASEAN.

Kerjasama di sektor industri merupakan salah satu sektor utama yang dikembangkan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama tersebut ditujukan untuk meningkatkan arus investasi, mendorong proses alih teknologi dan meningkatkan keterampilan negara‑negara ASEAN, termasuk dalam bentuk pertukaran informasi tentang kebijaksanaan perencanaan indus­tri nasional masing‑masing. Kerjasama ASEAN di sektor perindustrian diarahkan untuk menciptakan fasilitas produksi baru dalam rangka mendorong perdagangan intra‑ASEAN melalui berbagai skema kerjasama yang dikembangkan berdasarkan konsep resource pooling dan market sharing.

Kerja sama di bidang informasi dilaksanakan melalui berbagai proyek kerja sama seperti pertukaran berita atau program radio atau pertukaran program televisi melalui Berita Televisi ASEAN atau ASEAN Television News (ATN). Disamping itu juga dilaksanakan proyek lainnya seperti beberapa kegiatan terkait yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan ASEAN seperti misalnya pertukaran berita televisi dan radio; penggunaan Lagu ASEAN (ASEAN Anthem) dan moto ASEAN (ASEAN Motto ”One Vision, One Identity, One Community”) dalam program-program televisi; Kuis Kawasan ASEAN (ASEAN Regional Quiz) untuk mengasah pengetahuan para pemuda tentang ASEAN; Permainan Komputer ASEAN (ASEAN Computer Game) untuk menumbuhkan identitas kawasan melalui cara-cara yang menghibur; dan Proyek Pembuat Berita ASEAN (ASEAN Newsmaker Project) untuk memajukan pemahaman lintas budaya diantara pemuda ASEAN melalui media digital.

Peran informasi dan media cukup penting dalam mendukung upaya integrasi ASEAN dan mencapai tujuan ASEAN. Diharapkan dari pertemuan ini semua negara anggota dapat memperoleh peluang, mendiskusikan dan mengadopsi mekanisme teknik-teknik baru, pengetahuan dan kerja sama informasi guna memenuhi kebutuhan tuntutan global. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan saling pengertian antara masyarakat di Negara-negara ASEAN di berbagai bidang.[[5]](#footnote-6)

AMCA dibentuk pada tahun 2003.Pertemuan terakhir, yakni 4th AMCA, diadakan pada tanggal 22-26 Maret 2010 di Pampanga, Filipina.Di tingkat pejabat senior, ada pula Pertemuan Pejabat Senior Yang Bertanggungjawab di Bidang Kebudayaan dan Kesenian (Senior Officials Meeting Responsible for Culture and Arts/SOMCA).Pada pertemuan ke-empat AMCA diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2010 di Pampanga, Filipina. Pertemuan menyepakati antara lain usaha peningkatan kerja sama ASEAN dalam bidang budaya dan seni yang terfokus pada: (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) perlindungan, perawatan dan pemajuan warisan budaya ASEAN; dan (3) pembangunan usaha-usaha budaya kecil dan menengah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disepakati Rencana Kerja Kelompok Kerja (Work Plans of the Working Groups) untuk ketiga bidang tersebut.[[6]](#footnote-7)

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mengubah cara pandang pola piker, dan pola kehidupan manusia. Kekhawatiran terhadap **kelangkaan**(scarcity) barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, tampaknya telah semakin berkurang.Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan yang dapat mengambat kelangkaan barang dan jasa.Melalui inovasi, riset, dan pengembangan yang terus menerus, telah mampu menciptakan produk barang dan jasa baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dapat disediakan dan dipenuhi oleh produsen. Siapa aja yang berminat dan memiliki daya beli dapat memilih, meminta, dan membeli produk-produk baru, seperti handpone baru, mobil baru, TV baru, dan produk baru lainya. Bahkan siapa saja yang memiliki pontensi untuk membeli barang dan jasa dapat membelinya dengan mudah.[[7]](#footnote-8)

Ekonomi kreatif berkembang tidak hanya terbatas pada produk dan jasa, tetapi juga pada produk-produk seni budaya dan kerajanan (seperti seni pertunjukan, seni lukis, seni patung, seni tari, seni suara, seni desain, dan kreasi seni lainya).Produk ini sangat dinamis serta bernilai ekonomi dan komersial.

Produk kreatif juga tidak hanya berkembang pada industri kecil dan kerajinan, tetapi juga pada berbagai bidang dan jenis industri, baik kecil, menengah, maupun besar.Kegiatan ekonomi kreatif dilakukan pada industri makanan, pakaian, alat rumah tangga, otomotif, elektronika, bangunan, arsitektur, obat-obatan, dan hasil pertanian.Dalam bidang jasa, industry kreatif berkembang sedemikian pesat, seperti pada industri jasa pendidikan, keuangan, perbankan, penerbangan, perhotelan, pariwisata, transformasi, telekomunikasi, dan informasi.[[8]](#footnote-9)

Perkembangan kehidupan dunia ekonomi dan bisnis saat ini telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu dari ekonomi berbasis sumber daya ke paradigma ekonomi berbasis pengetahuan atau kreativitas.Pergeseran tersebut terjadi karena paradigma ekonomi berbasis sumber daya yang selama ini di pandang cukup efektif dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis di anggap telah gagal mengadaptasi dan mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan bisnis. Hal ini terbukti, hanya pada kelompok perusahaan yang peduli terhadap peningkatan kapasitas aset yang memiliki peluang untuk berinovasi dan mampu bertahan menghadapi gejolak perubahan lingkungan bisnisnya, dan disanalah peran ekonomi kreatif akan diuji.

Pada hakikatnya, sistem ekonomi globalisasi telah membentuk dunia perekonomian yang berkembang.Munculnya kapitalisme sebenarnya telah menambah perekonomian suatu negara.Banyak negara yang dengan cepat membuka pasar bagi ekspor asing.Perdagangan global makin marak terjadi didalam koorperasi.Globalisasi telah membentuk pola kehidupan ekonomi negara. Sehingga, globalisasi ekonomi dapat dilihat melalui cara pandang dan perspektifnya. Tingkat saling ketergantungan ekonomi yang terjadi sudah pernah terjadi pada masa lalu.Hanya perbedaannya, kini intensitas interaksi antarbangsa dan negara tersebut menjadi meningkat.meningkatnya hal tersebut belum tentu membuat perekonomian terintegrasi secara global.

Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan masayarakat pun semakin mengalami peningkatan seperti sifat manusia yang tidak puas, pertambahan penduduk yang semakin meningkat, kemajuan ilmu teknologi dan informasi, 2 perubahan taraf hidup yang semakin meningkat, dan kebudayaan yang semakin maju sehingga kebutuhan yang bervariasi dan beranekaragam membuat perkembangan ekonomi kreatif di arus pembangunan ekonomi modern ini harus membuat inovasi – inovasi sehingga membuat perkembangan ekonomi kreatif semakin meningkat. Namun dalam hal ini perkembangan ekonomi kreatif di indonesia kurang bisa di manfaatkan keterbatasannya ekonomi infomasi dalam penerapan iptek menjadi salah satu kendala di arus pembangunan ekonomi modern ini.[[9]](#footnote-10)

Industri kreatif saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan yang terus meningkat. Penciptaan hasil karya dalam industri kreatif tentunya terkait dengan pihak-pihak yang bekerja dalam proses produksi. Dalam hal ini, sounds atau suara, yang merupakan salah satu faktor dalam pesan, juga harus diolah secara maksimal untuk mendukung sebuah hasil karya yang berkualitas.

***Perpres Nomor 72 Tahun 2015*** tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif telah mengklasifikasi ulang sub-sektor industri kreatif dari 15 sub-sektor menjadi 16 sub-sektor, yaitu arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fashion; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Kontribusi 15 sub-sektor industri kreatif terhadap proporsi PDB tahun 2014, yang menunjukkan bahwa industri kuliner merupakan sub sektor dengan kontribusi PDB terbesar yaitu sebesar 32%. Sedangkan hasil analisa kuadran dengan menggunakan variabel tingkat pertumbuhan PDB dan proporsi terhadap PDB menunjukan bahwa industri fashion merupakan industri yang paling tinggi tingkat pertumbuhan dan proporsinya terhadap PDB. Sedangkan industri layanan komputer dan perangkat lunak; periklanan; arsitektur; riset dan pengembangan; fotografi, film, dan video; radio dan televisi; serta permainan interaktif, meskipun proporsinya terhadap PDB masih rendah, namun mencatat tingkat pertumbuhan tinggi sehingga potensial untuk dikembangkan.

Pengembangan ekonomi kreatif saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Rencana Induk Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia menuju 2025 mengidentifikasi tujuh isu utama yang menjadi tantangan bagi perkembangan ekonomi kreatif, yaitu sumberdaya manusia kreatif, bahan baku, daya saing industri, pembiayaan, pasar, infrastruktur dan teknologi, serta kelembagaan dan iklim usaha.[[10]](#footnote-11)

Di tengah tantangan perekonomian global yang semakin besar, pemerintah tengah berupaya mendorong berkembangnya industri kreatif menjadi sektor strategis yang mampu berperan lebih besar dalam perekonomian nasional dalam hal kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan ekspor. Sejumlah terobosan kebijakan telah dilakukan, diantaranya telah diprioritaskannya pengembangan ekonomi kreatif dalam RPJM Nasional 2015-2019 serta telah dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga yang akan mengawal pengembangan ekonomi kreatif secara khusus.

Pemerintah telah menetapkan pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari agenda prioritas nasional, serta membentuk **BEKRAF**[[11]](#footnote-12) untuk mengawal perkembangan ekonomi kreatif.Untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai kekuatan ekonomi baru Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam jangka panjang diarahkan tidak hanya untuk menumbuh kembangkan industri kreatif tetapi lebih jauh lagi mampu mengarusutamakan kreativitas dan inovasi di setiap sektor dan kehidupan bermasyarakat.Pencarian solusi terhadap berbagai permasalahan atau potensi yang ada di berbagai sektor prioritas pembangunan nasional perlu dilakukan secara kreatif, inovatif dan dapat dijawab oleh industri kreatif ataupun kolaborasi antara berbagai industri kreatif, untuk dapat menciptakan daya saing global dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

1. komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.
2. perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.
3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.
5. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
6. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif.[[12]](#footnote-13)

Industri kreatif bisa dikembangkan oleh negara manapun, baik negara maju maupun berkembangkarena setiap negara pasti memiliki sumber dayasumber daya kreatif yang tak terbatas sepertimanusia-manusia yang kreatif, kebudayaan yang bisa dieksplorasi, dan sebagainya.

Walaupun ada pengakuan ilmiah terhadap pentingnya kreativitas, namun hingga kini hanya sedikit sekali penelitian yang telah dilakukan.Hal itu disebabkan adanya kesulitan metodologi dan karena adanya keyakinan bahwa kreativitas adalah suatu faktor bawaan individual sehingga hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk mengendalikannya.Inovasi adalah proses pembaharuan/pemanfaatan/pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Inovasi juga dapat diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya.Orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Inovasi harus lah bermanfaat bagi sang inovator atau orang lain. Inovasi dibedakan menjadi dua macam antara lain sebagai berikut.

**Inovasi yang terjadi karena sengaja (invention)** : Inovasi invention adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada.

**Inovasi yang terjadi tanpa sengaja  (discovery)** : Inovasi discovery adalah penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat menjadi invention, ketika masyarakat mengakui dan dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut.[[13]](#footnote-14)

Dengan pertimbangan untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional, perlu mengikutsertakan para ahli untuk memberikan pemikiran yang terhimpun dalam Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Atas dasar pertimbangan ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional.Dalam Perpres itu disebutkan, Komite Ekonomi dan Industri Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Komite Ekonomi dan Industri Nasional memperhatikan masukan Tim Pengarah, yang terdiri atas: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: 4. Menteri Sekretaris Negara: 5. Menteri Keuangan; dan 6. Sekretaris Kabinet. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.[[14]](#footnote-15)

Untuk bisa mencapai target peningkatan sumbangan sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB), industri dinilai harus memiliki beberapa keunggulan dibanding negara lain. "Industri harus memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif," ujar Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 7 April 2016.KEIN sebelumnya mematok target kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto sebesar 40 persen dalam sepuluh tahun. Bila dikaitkan dengan konteks tadi, industri manufaktur Indonesia harus lebih unggul dibanding negara lain di Asia-Pasifik. Karena itu, industri di Indonesia harus bisa menguasai pasar dalam negeri.Namun ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan. Pertama, industri ingin diarahkan seperti apa serta harus berbasis sumber daya alam yang Indonesia memiliki dan pertanian dalam arti luas.[[15]](#footnote-16)

Berdasarkan perkembanganindustriekonomi kreatif diatas menjadi menarik untuk memperdalam perkembangan MEA dan ekonomi industri kreatif di Indonesia, serta menjelaskan perkembangan industri kreatif di Indonesia pengaruhnya terhadapekonomi industri kreatifdilihat dari aspek perdagangan, aspek industri Kreatif secara umum dan penyerapan tenaga kerja.Atas dasar itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul

**“Pemberlakuan MEA Implikasinya Terhadap Pembangunan Industri Ekonomi Kreatif Di Indonesia”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana pemberlakuan MEA dalam arus lalu lintas barang dan jasa korelasinya terhadap pengembangan industri ekonomi kreatif di ASEAN?
2. Bagaimana arah kebijikan BEKRAF dalam memfasilitasipengembangan SDM dan infrastruktur guna bersaing dalam industri ekonomi kreatif terhadap pemberlakuan MEA?
3. Sejauhmana peluang pengembangan industri ekonomi kreatif menjadi sektor strategis bagi pembangunan ekonomi di indonesia?
4. Bagaimana kontribusi BEKRAF sebagai lembaga yang mengawal pengembangan industri ekonomi kreatifterhadap pelaku usaha dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi sumber daya alam yang ada di Indonesia?
5. **Pembatasan Masalah**

Mengingat bahasan penelitian ini masih cukup luas, maka penulis membatasi penelitian tersebut yaitu pada stabilitas industri ekonomi kreatif menjadi sektor strategis bagi pembangunan ekonomi di Indonesia dan pengembangan industri ekonomi kreatif terhadap pelaku usaha dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi sumber daya alam yang ada di Indonesia.

1. **Rumusan Masalah**

Agar mempermudah dalam menganalisa permasalahan berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dirumuskan suatu masalah yaitu: **“Bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi dalam mengembangkan industri ekonomi kreatif bagi lalu lintas arus barang dan jasa di MEA dan khususnya di Indonesia?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pemberlakuan MEA dalam arus lalu lintas barang dan jasa korelasinya terhadap pengembangan industri ekonomi kreatif di ASEAN.
2. Untuk mengetahuiarah kebijikan BEKRAF dalam memfasilitasi pengembangan SDM dan infrastruktur guna bersaing dalam industri ekonomi kreatif terhadap pemberlakuan MEA.
3. Untuk mengetahuiSejauhmana peluang pengembangan industri ekonomi kreatif menjadi sektor strategis bagi pembangunan ekonomi di indonesia.
4. Untuk mengetahui kontribusi BEKRAF sebagai lembaga yang mengawal pengembangan industri ekonomi kreatifterhadap pelaku usaha dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi sumber daya alam yang ada di Indonesia.
5. **Kegunaan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara akademik sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana program Strata Satu (S1) pada jurusan studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung.
2. Secara teoritis sebagai referensi tambahan bagi pengembangan studi hubungan internasional yang berkaitan dengan masalah yang penulis sedang teliti yaitu mengenaiMEA Implikasinya Terhadap Pembangunan Industri Ekonomi Kreatif Di Indonesia.
3. Dapat memberikan kontribusi terutama sebagai penambah wawasan pengetahuan sebagai aspek yang saling berkaitan dalam realita sebagai peristiwa, masalah dan fenomena internasional yang sedang diteliti khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan ekonomi politik internasional maupun core subjek lainnya yang masih berhubungan.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Istilah hubungan internasional mengandung makna yang beragam.Istilah itu tidak saja dipahami secara berbeda-beda oleh para awam (non expert), namun diantara para ahli sendiri juga belum terdapat kebulatan pendapat[[16]](#footnote-17).Untuk mengetahui pemahaman yang lebih dalam sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan, maka penulis mengutip teori atau pendapat dari para ahli yang tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti, hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis. Adapun beberapa definisi mengenai pengertian hubungan internasional seperti menurut Charles McClelland sebagai berikut :

**“Hubungan internasional merupakan studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya[[17]](#footnote-18).”**

Masih mengenai istilah hubungan internasional, **Teuku May Rudi** dalam bukunya yang berjudul Teori, etika kebijakan hubungan internasional menjelaskan sebagai berikut:

**“Hubungan Internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintas batas-btas wilayah Negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan**, **berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara perorangan dari suatu bangsa atau Negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun secara tidak resmi dengan kelompok atau dengan peorangan dari bangsa atau Negara lain.”[[18]](#footnote-19)**

Interaksi dalam pergaulan inernasional tersebut menciptakan suatu kerjasama antara suatu Negara dengan Negara lain atau beberapa Negara dengan Negara lain yang disebut dengan kerjasama internasional. Konsep kerjasama internasional menurut K.J. Holsti yaitu :

**“Sebagian transaksi dan interaksi antar Negara dalam system internasional sekarang bersifat rutin dan hamper bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai Negara.Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alterative pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang di hadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan berbagai pihak”.[[19]](#footnote-20)**

Dari pengertian di atas setiap kerjasama yang dilakukan Negara-negara ditampung melalui suatu wadah formal yang memiliki tujuan yang sama dan aturan-aturan tertentu untuk memenuhi tuntutan dan keinginan dalam menyelesaikan segala bentuk masalah yaitu organisasi internasional. Teuku May Rudi dalam bukunya Organisasi dan Adminitrasi internasional, yang mengungkapkan bahwa:

**“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan dan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda”.[[20]](#footnote-21)**

Ketika warga Negara melihat peningkatan kesejahteraan akibat dari adanya kerjasama yang efisien dari organisasi international maka secara otomatis mereka akan mengubah kesetian mereka dari Negara kepada organisasi internasional.

Adapun tahap-tahap menuju organisasi internasional, sebagai berikut:

Tabel. 1 karakterestik masing-masing tingkatan integrasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| First rung  Second rung  Third rung  Fourth rung  Fifth rung | FTA  Custom union  Common market  Economy and monetary union  Full poltical union | Goal: no tarrifs or other trade barriers (example : North American, Europe, ASEAN Free Trade Area, Nafta, EFTA and AFTA).  Goal: common external tarrif against import (ex : EEC)  Goal: free movement of factors of production (land, labor and capital) within integration area (ex : Europe 1992, single European Act  Goal: common currency and integrastion economy policies (ex : European Union Treaty  Goal: complete economy and political integration |

Sumber: Paul R. Vioti and Mark.V. Kaupi (1997). Internasional Relations In Word Politics: Security, Economic, Identity. New Jersey Prantice Hall. Hal.246

Dari teori diatas, dalam organisasi internasional dapat tercipta hubungan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan bernegara salah satunya yang paling penting adalah kehidupan ekonomi.Kerjasama ekonomi ini dapat terjadi antara pemerintah Negara satu dengan yang lainnya atau orang perorangan (perusahaan).Kerjasama ekonomi ini biasa disebut dengan ekonomi internasional. Nopirin menyebutkan:

**“Ekonomi internasional mempelajari alokasi sumber daya langka guna memenuhi kebutuhan manusia yang dipelajari dalam ruang lingkup internasional. Artinya masalah alokasi dianalisa dalam hubungan antar pelaku ekonomi satu dengan Negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antar dua Negara tersebut maupun beberapa Negara”.[[21]](#footnote-22)**

Melalui kerjasama ekonomi dapat mempersempit ketimpangan ekonomi internasional serta upaya mencari solusi daripada problematika ekonomi yang dihadapi suatu Negara melalui diolag, perundingan dan pertukaran pandangan untuk meningkatkan itensitas kerjasamanya sehingga mengahasilkan keuntungan yang dapat dijadikan pemicu dalam memajukan perekonomiannya.Oleh karena itu kerjasama ekonomi sering disebut sebagai aspek fundamental dalam kerjasama internasional. Pendapat lain tentang ekonomi internasional, Domnick Salvatore menyebutkan “ekonomi internasional adalah aktivitas yang timbul oleh ekonomi dari keadaan saling ketergantungan unit-unti politik yang melintasi batas-batas Negara dan bersifat internasional”.[[22]](#footnote-23)Masalah ekonomi muncul bersamaan dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internsional, kembali Dominick Salvatore memberi batasan menganai ekonomi internasional yang mengatakan “ekonomi internasional membahas hubungan antara Negara-negara saling ketergantungan (interdependence) yang timbul sebagai akibat daripada kepentingan terhadap kesejahteraan ekonomi dihampir semua Negara di dunia yang semakin meningkat”.[[23]](#footnote-24)

Menurut R.E.A. Ma’moer tujuan dari ekonomi internasional adalah :

**“tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapaitingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah kerjasama bantu membantu antar bangsa dan Negara. Dengan adanya kerjasama ini kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh persedian didalam negeri dapat dipenuhi oleh Negara lain.”.[[24]](#footnote-25)**

Ekonomi internasional merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing Negara atau orang (perusahaan). Keterlebatan suatu Negara dalam kerjasama internasional tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya masing-masing untuk membangun ekonomi nasionalnya. Adapun kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah:

**“Tujuan mendasar serta factor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapo merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi sebuah Negara.Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhaan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”.[[25]](#footnote-26)**

Dalam tataran teoritis, kepentingan nasional dan orientasi kebijakan politik luar negeri menjadi dasar pertimbangan suatu Negara yang bekerjasama dan berintraksi dengan Negara lain.[[26]](#footnote-27) Konsep kebijakan luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton yaitu: “Strategi atau tindakan yang di bentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam mengadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang ditangkan dalam terminology kepentingan nasional”.[[27]](#footnote-28)

Adanya ekonomi internasional tidak biasanya akan membawa arus liberalisasi ekonomi. Liberalisasi menurut kamus besar bahasa indonesias adalah berasal dari kata liberal yang berarti “bersifat bebas / pandangan luas” dan liberlisasi adalah “proses (usaha dsb) untuk menerapkan paham liberal di kehidupan (tata Negara dan ekonomi).[[28]](#footnote-29)

Liberalisasi ekonomi merupakan sebuah paham atau system ekonomi yang menempatkan peran swasta sebagai tokoh utama dari palaku ekonomi. Dalam ekonomi liberal, peran pemerintah tidak diperkenankan turut ikut campur.Semuanya di atur oleh swasta ataupun individu pemilik modal.Dengan demikian, dalam system ini masyarakat diharapakan mampu berkompetisi untuk menjadi yang lebih baik.Dalam UUD NKRI Tahun 1945 ada peran yang diberikan kepada Negara yang sangat besar untuk menata ekonomi. Anggota MPR M.Lukman Edy menyebutkan bahwa “UUD memberi ruang liberalisasi namun ditegaskan bahwa liberalisasi ini berbeda dengan liberalisasi yang dimaknai oleh barat. Liberalisasi disini di atur oleh Negara bukan pasar”.[[29]](#footnote-30)

Namun bagi kaum liberal, ekpansi perekonomian dunia tidak akan terjadi apabila kepentingan politisi terus menerus berada di atas mekanisme pasar. Adalah Adam Smith (1723-190) yang melopori gugutan paham terhadap mekantilisme. Bagi Smith, kemakmuran tidak dapat dilihat hanya dari kemampuan suatu Negara untuk menumpuk emas, perak dan barang berharga lainnya, tetapi merupakan suatu hasil dari tindakan berproduksi dan bertransaksi secara bebas yang saling menguntungkan bagi setiap pihak.

Menurut Smith, perdagangan bebas akan dengan sendirinya meciptakan system pembagian kerja internasional (International division or labour) yang saling menguntungkan karena setiap Negara akan berkonsentrasi pada sektor-sektor yang dianggapnya paling menguntungkan. Dengan demikian para pemikir liberal berpendapat bahwa keterlibatan Negara dalam system perdagangan bebas hanya diperlukan jika untuk pencapaian kesejahteraan bersama.

Bagi kaum liberal seperti Smith, system pasar bebas akan berjalan dengan sempurna jika didukung oleh dua hal penting. Pertama, adanya system pembayaran internasional yang stabil dalam pengertian bahwa nilai tukarnya dapat dipertahankan dalam waktu lama dan tidak fluktuatif.Kedua, pemilihan spesialisasi produksi oleh suatu Negara hendaknya ditentukan oleh mekanisme yang disebut dengan istilah absolute advantage (keuntungan absolut). Mekanisme ini di sarankan pada presmis bahwa Negara hendaknya tidak memproduksi barang-barang yang dapat beli dari Negara lain dengan harga lebih murah dari pada jika dibuat sendiri.[[30]](#footnote-31)

Skindmore dan Lairson memberikan pengertian tentang perdagangan bebas sebagai berikut:

**“Free trade a variant on the nation of free market and is probably the most important contribution that liberals make to study of international poltical economy. The central assertion is unrestricted, production will take place where it is most efficienly done and all nations will benefit. Standing behind this view is a concept of allocating resources to the production of goods in the most effiecient way, that is, a division of labor operates among nations so that each concetrates on the set of goods to which it is best suited as compared with other nations and with all the kinds of goods it could produces. Economist focus their assessment of the benefits and costs trade on efficiency and the lowest prices for goods and focus less on the politically relavant costs of the economic adjustments that people must make ton satisfy the demands of free trade”.**

Salah satu pokok kajian yang dibahas ekonomi internasional adalah perdagangan internasional.Perdagangan internasional dapat berupa barang dan jasa. Dikutip dari Boediono dalam bukunya yang berjudul perdagangan internasional bahwa:

**“perdagangan di luar negeri adalah istilah kependekan dari kegiatan pertukaran antar penduduk di Negara lain, dari segi ini perdagangan internasional tidak berbeda dengan pertukaran antara dua orang di dalam suatu Negara, perbedaannya adalah dalam perdagangan nternasional orang yang satu kebutulan tinggal di Negara lain.[[31]](#footnote-32)**

Perdagangan internsional, Soelistyo menyebutkan:

**“perdagangan internasional pada saat ini merupakan proses kegiatan ekonomi yang penting. Perdagangan yang terjadi dalam beberapa skala memungkinkan terjadinya saling tukar menukar barang-barang dan jasa, pengerahan sumber daya, juga meliputi pertukaran dan peluasan penggunaan teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran bangsa-bangsa.[[32]](#footnote-33)**

Perdagangan juga bisa dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain yang berada dalam satu kawasan yang diwadahi oleh organisasi formal. Intergrasi ekonomi tersebut pada umumnya didasari oleh beberapa factor seperti geografis, sosilogis, ekonomi, etnis dan sebagainya. Salah satunya adalah kawasan asia tenggara yang membentuk sebuah organisasi regional yang disebut ASEAN (Association of South East Asia Nation) berikutnya konsep mengenai organisasi regional menurut Teuku May Rudi “organisasi internasional regional adalah organisasi yang wilayah kegiatannya regional dan keanggotaannya hanya diberikan bagi Negara-negara pada kawasan tertentu”.[[33]](#footnote-34)

Melalui organisasi regional, Negara-negara anggota ASEAN terus berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya dengan meningkatkan kerjasama ekonomi intra-ASEAN. Pengertian regional/kawasan sendiri menurut Uttara Sahasrabudhe yang berasal dari india dalam bukunya yang south asia, A peripheral region (diambil dari perkuliahan HI kawasan pada 19 maret 2013) beliau memberi 3 point dalam pembahasan mengenai kawasan atau region yaitu:

1. Kawasan dapat didefiniskan sebagai semata-mata suatu kesatuan entitas geografis, yang muncul dari pengabungan unit-unit yang berdasar sedikit banyak dengan dasar pembagian bersama ketertarikan atau kekhasan dari masing-masing unit tadi.
2. Regionalism adalah proses politik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas penyatuan dalam kawasan geografis.
3. Regionness adalah suatu indikasi dari perbedaan tingkatan-tingkatan dari penyatuan dalam unit-unit geografis.[[34]](#footnote-35)

Adapun konsep kerjasama regional yang di kutip dari Sjamsumar Dam dan Riswandi dalam bukunya kerjasam ASEAN:

**“Pada dasarnya kerjasama regional merupakan bentuk saling ketergantungan yang diatur berdasarkan kedekatan geografis yang bias berkembang menjadi berbagai kepentingan bersama. Oleh karena itu, regionalism merupakan tahap yang diperlukan masyarakat internaasional dalam menuju globalisasi yang di cita-citakan, sebagai mana yang tercemin dalam piaga PBB.[[35]](#footnote-36)**

Dalam pandangan lain, konsep kedaulatan negara dan kepentingan nasional mengalami pelunturan akibat kondisi dunia yang mengalami globalisasi. Seperti yang dikatakan Scholte :

**“Di bawah pengaruh globalisasi kontemporer, negara telah menjadi kurang konsisten dalam memegang garis teritorial pertahanan 'dalam' terhadap yang 'luar'. Negara tidak lagi selalu jelas mempromosikan kepentingan dalam negeri terhadap orang-orang asing. Sebaliknya, negara-negara pasca-berdaulat cenderung menjadi arena kolaborasi dan kompetisi berbagai kepentingan teritorial dan supraterritorial”.[[36]](#footnote-37)**

Dari teori tersebut kerjasama ekonomi intra-ASEAN dimaksudkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dikawasan tersebut yang dilakukan secara bertahap.Salah satu usaha yang dilakukan ASEAN yaitu membentuk suatu komunitas ASEAN yang mempunyai 3 pilar yaitu komunitas politik-keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN dan social budaya ASEAN.Dalam ruang lingkup internasional fenomena ekonomi global menujukan perkembangan yang tidak merata ditandai dengan ketimpangan yang terjadi dalam system ekonomi internasional ditunjang dengan persaingan yang semakin kompetitif antar pelaku ekonomi internasional ditengah era globalisasi ekonomi.

Demikian pula halnya dengan ASEAN terutama Indonesia menyadari akan semakin beratnya tangtangan yang akan dihadapi serta senantiasa berusaha mencari solusi dalam mengatasi permasalahan ekonominya, menempatkan kerjasama ekonomi sebagai alternatif pilihan dalam meningkatkan perekonomiannya dan pada akhirnya muncul suatu ketergantungan atau interdependensi, T. May Rudi mengatakan”ketergantungan ekonomi adalah salah satu dasar kondisi kehidupan internasional, tidak satu pun Negara bangsa ini secara ekonomi dapat berdiri diri sendiri dalam rangka mempertahankan hidupnya.[[37]](#footnote-38)

ASEAN memandang pentingnya untuk memperdalam dan mengembangkan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan demikian semakin tinggi interdependensi antar Negara dalam satu kawasan menunjukan semakin tinggi pula keterkaitan ekonomi dengannya. Disisi lain semakin terintegrasinya pasar AS dan Eropa sebagai Negara yang mengusai dan mendominasi pasar internasional dan sebagai Negara tujuan utama bagi kegiatan ekspor ASEAN.

AEC diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang di hadapi seperti mengurangi ketergantungan terhadap Negara barat dan mengimbangi dominasinya dalam kekuatan ekonomi internasional yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan perekonomian ASEAN pada umumnya dan pada Indonesia pada khususnya. Salah satu bentuk implementasi ASEAN Economic Community (AEC) adalah adanya perdagangan bebas antar Negara kawasan merupakan bentuk perwujudan AEC, pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA). Soedrajat Dwiwandono menyebutkan definisi perdagangan bebas adalah:

**“Bahwa Negara-negara dalam kawasan yang menjadi anggotanya sepakat untuk membebaskan perdagangan diantara mereka yang mencakup perdagangan. Jika para anggota sepakat untuk menyatukan kebijaksanaan perdagangan dalan bentuk penghapusan bea masuk untuk perdagangan antar Negara anggota guna mendorong peningkatan perdagangan antara mereka”.[[38]](#footnote-39)**

Berikut ini penulis akan memberikan beberapa pengertian ekspor dari salah satu ahli ekonomi menurut Todaro (2000) yaitu:

**“Ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan guna membutuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, bersamaan dengan strukturpolitik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel.”[[39]](#footnote-40)**

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah Negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah *output* dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat *output* yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2006).

Sedangkan pengertian impor berdasarkan UU No.17 th.2006 kepabeanan adalah:

**“Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.”[[40]](#footnote-41)**

Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi secara sendiri untuk menunjang pembangunan ekonomi, namun apabila dilakukan dalam batas yang berlebihan (melebihi nilai ekspor) dapat menyebabkan defisit yang berujung pada terhambatnya proses pembangunan ekonomi.

Prof. P. A. Samuelson mengatakan bahwa Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan komsumsi, sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.

Ilmu Ekonomi terbagi dua, yaitu : ekonomi mikro dan makro.

1. Ekonomi mikro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil ekonomi seperti perilaku individu-individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dll.
2. Ekonomi makro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perekonomian baik suatu negara / daerah seperti inflasi, kemiskinan, neraca.[[41]](#footnote-42)

Walaupun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, kegiatan pembangunan selalu dipandang sebagai sebahagian dari keseluruhan usaha pembagunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan.

Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi menurut Michael P Todaro dalam buku Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga edisi ketujuh yang diterjemahkan oleh Drs. Haris Munandar, M.A. pada umumnya didefinisikan sebagai berikut :

**“Pembangunan ekonomi adalah sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional untuk menciptakan dan mempertahan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (gross national product) pada tingkat lebih tinggi yang diukur melalui tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita sebagai indikator tingkat kemajuan pembangunan.”[[42]](#footnote-43)**

Selain itu.ada empat indikator dalam pembangunan ekonomi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, formasi modal, dan teknologi. Salah satu masalah utama yang dihadapi pembangunan adalah kemiskinan dan ketimpangan yang disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah menghambat tabungan, memperlambat pertumbuhan modal, menghalangi pertumbuhan produktivitas, dan kembali menyebabkan rendahnya pendapatan. Hal tersebut bagaikan lingkaran setan, dimana pembangunan yang berhasil akan memutus rantai tersebut sehingga mencapai tingkat kesejahteraan (Samuelson dan Nordhaus, 2003:274).

Dapat disimpulkan, bahwa pembangunan ekonomi menurut Todaro (2000:24) merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan.

Sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mempunyai peran yang penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Adapun definisi pertumbuhan ekonomi menurut Samuelson dan Nordhaus yaitu :

**“Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output nasional negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi (production possibility frontier/PPF) bangsa bergeser ke luar. Konsep yang berkaitan erat adalah tingkat pertumbuhan output per orang. Ini menentukan tingkat ketika standar – standar hidup negara naik. Negara-negara terutama menaruh perhatian pada pertumbuhan output perkapita karena menyebabkan peningkatan rata-rata pendapatan( Samuelson dan Nordhaus, 2003: 246)”**

Pertumbuhan ekonomi mempunyai empat roda yaitu Sumber daya manusia (penawaran tenaga kerja, pendidikan, disiplin, motivasi), Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, kualitas lingkungan).Pembentukan modal (mesin, pabrik, jalan).Teknologi (sains, rekayasa, manajemen, kewirausahaan).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi maka dilakukanlah ekspor.Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari *Gross National Product* (GNP), sehingga dengan berubahnya nilai ekspor maka pendapatan masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Di lain pihak, tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap keguncangan-keguncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun di perekonomian dunia.

Tingkat pengeluaran rumah tangga dan impor bukanlah faktor utama yang menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dari masa ke masa karena tergantung kepada pendapatan mereka.Sedangka ketiga faktor lainnya, yaitu penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan, pengeluaran impor, dan ekspor ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar tingkat pendapatan masyarakat.Tingkat penanaman modal ditentukan oleh tingkat bunga, pengeluaran pemerintah ditentukan oleh pertimbangan politik dan usaha untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh yang diikuti oleh kestabilan harga (*full employment without inflation*), dan ekspor ditentukan oleh keadaan permintaan di luar negeri serta daya saing produk juga oleh tingkat kurs. Perubahan dalam ketiga jenis pengeluaran tersebut akan menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam pendapatan nasional. Ini disebabkan karena perubahan dalam satu atau gabungan dari ketiga jenis pengeluaran tersebut akan menciptakan suatu proses yang akan menimbulkan suatu rangkaian tambahan pendapatan dan pengeluaran yang baru disebut proses multiplier[[43]](#footnote-44) (Sadono Sukirno, 1985: 252).

Pada umumnya, tanpa adanya campur tangan pemerintah, seluruh pengeluan dalam perekonomian tidak sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh maka diperlukan kebijakan fiskal untuk mengatur itu semua. Adapun definisi kebijakan fiskal menurut Sadono Sukirno yaitu :

**“Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi (Sadono Sukirno, 1985: 264).”**

Untuk mencapai tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.Maka BEKRAFberusaha mengatur keseimbangan antara persediaan barang dan jasa agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang dan jasa.Adapun pengertian kebijakan distribusi barang dan jasa menurutilmu ekonomi,pengertian distribusi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dan produsen (penghasil) ke tangan konsumen (pemakai) atau yang membutuhkannya. Contoh kegiatan distribusi di antaranya kegiatan jual beli atau pemasaran,pengangkutan dan pembagian jatah dan pemerintah.Fungsi distribusi adalah untuk menyalurkan barang atau jasa sehingga sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkannya membantu produsen dan konsumen, sebab dengan tersalurnya barang atau jasa tersebut, maka baik produsen maupun konsumen memperoleh kemudahan/keuntungan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Sistem distribusi adalah cara-cara yang dilakukan dalam menyalurkan barang dan jasa sehingga sampai ke tangan yang memerlukannya.[[44]](#footnote-45)

Keputusan mengenai saluran distribusi dalam pemasaran adalah merupakan salah satu keputusan yang paling kritis yang dihadapi manajemen. Saluran yang dipilih akan mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran yang lainnya. Dalam rangka untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maka perusahaan harus benar-benar memilih atau menyeleksi saluran distribusi yang akan digunakan, sebab kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi ini dapat menghambat bhkan dapat memacetkan usaha menyalurkan barang atau jasa tersebut.pengertian saluran distribusi menurutC. Gleen Walters :

**“saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu”.[[45]](#footnote-46)**

Pada giliranya, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mengubah pola-pola kehidupan ekonomi masyarakat secara global dalam berbagai bidang, seperti pola produksi, pola distribusi dan pola konsumsi.Perubahan pola produksi dan distribusi telah mendorong pola perubahan kebutuhan dan pola komsumsi masyarakat.Perubahan pola-pola tersebut terangsang oleh terciptanya produk-produk baru.

Di samping telah di temukanya produk-produk baru, telah tercipta juga sarana transaksi ekonomi baru yang mempermudah, lebih efisien dan lebih efektif, seperti sistem pembayaran online, sistem pemesenan online, dan semua sistem transaksi elektronik telah mempermudah transaksi ekonomi dan merangsang keinginan dan kebutuhan konsumen untuk meminta dan membeli barang dan jasa baru. Penemuan Microsoft, kartu kredit (credit card), sistem pesan singkat (short message system), dan sistem pembayaran elektronik telah mempermudah transaksi ekonomi. Sistem pembayaran tersebut lebih terjamin, cepet, tepat, hemat, akurat, dan memudahkan pergerakan arus barang dan jasa secara global.

Di samping pola-pola ekonomi yang terus berubah, inovasi teknologi dan kreativitas ilmu pengetahuan juga telah mengeser orientasi ekonomi, dari ekonomi pertanian ke ekonomi indistri, ekonomi jasa, ekonomi informasi (e-commerce) dan akhirnya ke ekonomi kreatif (creative economy).[[46]](#footnote-47)

Perubahan-perubahan orientasi ekonomi tersebut oleh Howkins (2001) dikenal dengan “gelombang ekonomi”, dan sekarang memasuki gelombang ekonomi ke empat, yaitu”gelombang ekonomi kreatif”. Menurut Howkins, pada awal abad ke 21 atau tepatnya sejak 2001, kita telah memasuki era baru, yaitu **era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif** merupakan kegiatan ekonomi yang di gerakan oleh industri kreatif yang mengutamakan peranan kekayaan intelektual.Industri kreatif itu sendiri di gerakan oleh para entrepreneur (wirahusaha), yaitu orang yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif.Menurut Daniel Pink dalam *A Whole New Mind* (2005), gelombang ekonomi kreatif tersebut disebutkan sebagai abad konseptual dari para creator dan orang yang memiliki empati (htpp://www.creativityatwork.com/what-is-creativity/, 2012:2).[[47]](#footnote-48)

Sistem ekonomi suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, Indonesia sendiri menerapkan sistem ekonomi Pancasila atau persaingan terkendali. Adapun penjelasan mengenai sistem ekonomi Indonesia (terkendali) seperti yang diungkapkan oleh Dumairy dalam bukunya Perekonomian Indonesia yaitu :

**“Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem yang mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara yang diatur dengan tegas dalam pasal 33 UUD 1945.Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia buka kapitalisme dan bukan pula sosialisme.”[[48]](#footnote-49)**

Salah satu upaya negara untuk mengurangi ketimpangan antar daerah/wilayah tentunya melalui pemerataan pembangunan pada daerah-daerah.Pembangunan regional merupakan bagian integral dalam pembangunannasional karena pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global yang secara geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan demikian diharapkan hasil pembangunan akan dapatterdistribusi dan teralokasi ke tingkat regional. Seperti yang dikatakan oleh Mandala Harefa, Periset Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan data danInformasi Sekretarian Jenderal DPR RI mendefinisikan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai berikut :

**“Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.Selamakurun waktu yang cukup panjang, melalui perubahan struktur ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditandai oleh perubahan dari sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri manufaktur.”[[49]](#footnote-50)**

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang juga menitikberatkan proses moderenisasi dan perkembangan kedalam suatu strategi, seperti yang dikatakan oleh H. Bintoro Tjokroaminoto, seperti:

**“strategi adalah kesulurahan langkah atau kebijaksanaan dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu persoalan”.[[50]](#footnote-51)**

Strategi yang tepat bagi Indonesia dalam menciptakan produk-produk yang unggul untuk menghadapi liberalisasi ekonomi mnelalui AEC ini juga harus meningkatkan strategi industrialisasi ekspor seperti yang di katakana oleh Bob Sugeng Hadiwinata:

**“strategi industril yang berorientasi ekspor pada dasarnya merupakan upaya suatu Negara untuk memproduksi barang-barang industry bagi pemenuhan permintaan pasar dunia”.[[51]](#footnote-52)**

Jack Plano menegaskan lagi tentang strategi didalam bukunya kamus Analisa politik, sebagai berikut:

**“strategi merupakan suata ancang-ancang untuk mengalahkan lawan atau bentuk mencapai tujuan lain. Strategi biasanya mengacu pada rencana dan yang menyeluruh atau yang mencakup serangkaian gerakan yang berlangsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh sebaliknya taktik terdiri dari gerakana tunggal atau serangkaian langkah terbatas, kearah tujuan antara intermediate didalam perencanaan strategi yang luas”.**

Dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi merupakan taktik atau langkah-langkah yang telah dipersiapkan dengan matang untuk memenuhi kepentingan nasional dari masing-masing Negara semaksimal mungkin.

Pengertian kepentingan nasional menurut Moctar Mas’oed dalam bukunya ilmu hubungan internasional:

**“kepentingan nasional setiap Negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bias membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lainya. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-tekni paksaan ataupun kerjasama.Kekuasaan dan kepentingan dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan tindakan politik internasional”.[[52]](#footnote-53)**

Kepentingan nasional memberikan konsistensi yang di perlukan dalam kebijakan nasionalnya.Suatu Negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasionalnya. Dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih cenderung mempertahankan kesimbangan dan melanjutkan usaha kearah tujuannya daripada mengubah kepentingan dari menyesuaikan diri dengan situasi baru kepentingan nasional yang satu mempunyai titik silang dengan kepetingan nasional. Dengan kepetingan nasional haruslah bersifat fleksibel.

Indikator kesuksesan ekonomi Indonesia tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Adapun definisi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistikadalah :

**“Pertumbuhan Ekonomi Indonesia adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dimana perekonomian Indonesia tahun 2015 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau US$3,377.1.yang secara mayoritas di dominasi oleh pendapatan dari Pulau jawa dengan pertumbuhan rata-rata 58,29% (dibawah 6%) per tahun.”[[53]](#footnote-54)**

Berdasarkan konsep-konsep dan teori yang dikemukakan para ahli diatas berkenaan dengan objek penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa asumsi :

1. Dengan adanya strategi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi AEC maka akan mengantisipasi dominasi pasar bebas oleh Negara ASEAN lainnya.
2. Dengan adanya liberalisasi ekonomi melalui AEC akan semakin terbukanya peluang industri ekonomi kreatif Indonesia untuk lebih inovasi dan kreatif dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga dapat mendapatkan kedudukan yang baik dalam pangsa pasar di ASEAN maupun kawasan lainnya.
3. Bersumber pada fakta bahwa struktur perekonomian Indonesia masih kuat dualisme-nya. Dengan kata lain, di dalam jangka waktu lama Indonesia akan dibayangi oleh masalah diktomi antar sektor modern-kota dan sektor tradisional pedesaan. Di dalam upaya pembangunan ini yang akan selalu muncul sebagai suatu masalah besar adalah mencari keseimbangan antara upaya industrialisasi/modernisasi yang berpusat di perkotaan dengan upaya pembangunan pertanian/kehutanan/perkebunan/perikanan yang berpusat di daerah pedesaan. Kondisi ini membuat tingginya impor (pola konsumsi) karena perkembangan industri hilir tidak diikuti oleh industri hulu (belum terintegrasi). Hal itu menyebabkan banyak industri hilir cenderung memilih bahan baku impor sehingga menimbulkan defisit transaksi berjalan terutama neraca jasa dan neraca perdagangan, ditambah produk ekspor Indonesia sebagian besar adalah bahan mentah bukan produk manufaktur.
4. Pemerintah telah menetapkan pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari agenda prioritas nasional, serta membentuk badan ekonomi kreatif untuk mengawal perkembangan ekonomi kreatif dan operasi pasar terhadap pelaku usaha dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi sumber daya alam yang ada di Indonesia.
5. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka penelitian dan asumsi yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**“jika pemberlakuan MEAdalam program kerjasama ekonomi yang terintegrasi serta bebasnya hambatan dalam transaksi aliran barang-jasa dalam mewujudkan visi ASEAN 2020 maka tindakan pemerintah melalui pemberdayaan SDM, infrakstruktur serta teknologi menjadi sektor strategis bagi pembangunan ekonomi dan pengembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia”.**

1. **Tabel Operasionalisasi dan Indikator**

Tabel 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam**  **Hipotesis**  **(Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| Variabel Bebas :  Jika pemberlakuan MEA dalam program kerjasama ekonomi yang terintegrasi serta bebasnya hambatan dalam transaksi aliran barang-jasa dalam mewujudkan visi ASEAN 2020 | 1. Integrasi kerjasama ekonomi ASEAN 2. Aliran bebas barang dan Jasa | Seperti yang dikatakan pembentukan komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya ASEAN menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan dosmetik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN.  (Sumber ASEAN, history of ASEAN Community, melalui http://aseantalk.com/index.php/topic=2.0 diakses pada tanggal 12 Juni 2016)  Sebelum tahun tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV (dengan kelonggaran bagi produk-produk sensitif sebelum tahun 2018) sector-sektor integrasi prioritas: sebelum 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk CLMV. tarif daftar sensitif (SL) sebesar 0,5% sebelum 1 januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 januari 2013 untuk vietnam, 1 januari 2015 untuk laos dan Myanmar, serta sebelum 1 januari 2017 untuk kamboja. Fase produk-produk dalam daftar pengecualian umum (general exceptions list). Penghampusan hambatan-hambatan non tarif sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-5, Tahun 2012 untuk Filipina, dan tahun 2015 dengan kelonggaran sampai tahun 2018 untuk CLMV. Menghapus transaksi-transaksi perdagangan melalui: fasilkitas perdagangan, integrase bea cukai, jendela tunggal ASEAN.  (sumber: cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN).  -menyingkirkan semua hambatan perdagangan dalam jasa sebelum tahun 2015  - meliberalisasi jasa keuangan secara progresif sebelum tahun 2020  -liberlisasi melalui rumusan/formula ASEAN minus X  -pengaturan-pengaturan pengakuan yang setara (Mutual recognition arrangements/MRAs).  (Sumber: cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN). |
| Variablel terikat :  maka tindakan pemerintah melalui pemberdayaan SDM, infrakstruktur serta teknologi menjadi sektor strategis bagi pembangunan ekonomi dan pengembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia | 1. Pemberdayaan SDM bagi pembangunan ekonomi indonesia 2. pemgembangan infrakstruktur serta teknologi menjadi sektor strategis industri ekonomi kreatif di Indonesia 3. pembangunan ekonomi dan pengembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia | Memujudkan bangsa yang berdaya saing mengedepankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing:   * meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, pemanfaatan melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan * membangun infraksturktur yang maju serta repormasi di bidang hukum dan aparatur Negara * dan memperkuat perekonomian domestic berbasis unggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.   (sumber: rencana strategis kementrian KUMK RI tahun 2012-2014. Pdf)  Indonesia dengan potensi kekayaan yang sangat besar baik potensi sumberdaya alam, keragaman budaya, maupun sumberdaya manusia, perlu mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan nasional untuk mengoptimalkan berbagai potensi kekayaan yang dimilikinya. Ekonomi kreatif yang berbasis kepada modal kreativitas sumberdaya manusia, berpeluang mendorong daya saing bangsa Indonesia di masa depan. Jika sumberdaya manusia Indonesia yang jumlahnya sangat besar memiliki kemampuan untuk berkreasi untuk menciptakan inovasi dan nilai tambah, maka kreativitas tersebut akan menjadi sumberdaya terbarukan yang tidak ada habisnya. Kreativitas akan mendorong dihasilkannya produk-produk manufaktur dan jasa yang inovatif dan bernilai tambah tinggi sehingga kelak Indonesia tidak akan lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi juga akan mampu mengekspor produk yang bernilai tambah tinggi. Kreativitas dan inovasi juga akan menjadikan warisan budaya dan kearifan lokal berkontribusi besar tidak hanya bagi perekonomian nasional namun juga bagi peningkatan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional.  (sumber: http://www.ekon.go.id/berita/view/ekonomi-berbasis-kreativitas.1659.html)  Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment(FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.  (sumber: http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi) |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Skema Pemberlakuan MEA Implikasinya Terhadap Pembangunan Industri Ekonomi Kreatif Di Indonesia.

Peluang dan tantangan

Pasar tunggal berbasis produksi

ASEAN Economic Community 2015

Pengembangan Industri ekonomi Kreatif

1. **Metode dan Teknik Pengumulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa induksionis penelitian yang unit ekplanasinya pada tingkat yang lebih tinggi. Pada penelitian ini meningkatkan daya saing serta peluang industry ekonomi kreatif Indonesia sebagai variable dependen dan liberalisasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community 2015 dan pengaruhnya bertindak sebagai variable independen berada pada tingakatan yang sama.

1. **Metode Deskriptif Analisis**

Yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan secara sistematik suatu peristiwa atau masalah menjadi topic kajian secara sistematik dan mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut sebab akibat dan penyusunan data namun meliputi analisis dan interpretasi data-data.Dalam hal ini penulis menjelaskan sebab dan dampak dari Pemberlakuan MEA Implikasinya terhadap Industri Ekonomi Kreatif di Indonesia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan bahan informasi ataupun dokumentasi penulis menggunakan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu studi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari arsip-arsip, laporan-laporan serta data informasi yang diperlukan dari berbagai bahan seperti buku-buku wajib, surat kabar, majalah, artikel, serta makalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Juga melalui media Internet yang berupa ebook, e-jurnal, e-paper dalam bentuk Portable Document Format (PDF).

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, pemilih beberapa lokasi yang dianggap mampu menyediakan bahan atapun data yang sangat berguna bagi penelitian ini. Lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Perpustakaan FISIP UNPAS**

Jln. Lengkong besar

1. **Perpustakaan UNPAR**

Jln. Cieumbeleuit bandung

1. **Perpustakaan Bapusipda Bandung**

Jln. Soekarno Hatta No.629 Bandung

1. **Kementrian Luar Negeri**

Jln. Pejambon no.6 jakarta

1. **Badan Ekonomi Kreatif**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta

1. **Kemetrian Koorditor Bidang Perekonomian**

Jl. Merdeka Barat No. 7, Jakarta

1. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli), Jakarta: (PT RajaGrafindo Persada), 2000, Hal. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. ASEAN selayang pandang, Direktorat kerjasama ASEAN kementrian Luar Negeri Repubplik Indonesia. 2010 hal 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. hal. 3 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid. hal. 5-6 [↑](#footnote-ref-5)
5. ASEAN selayang pandang, Direktorat kerjasama ASEAN kementrian Luar Negeri Repubplik Indonesia. 2010 hal 126 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, hal. 128 [↑](#footnote-ref-7)
7. Suryana, ekonomi kreatif, ekonomi baru : mengubah ide dan menciptakan peluang, Jakarta:salemba empat, 2013, hal.2 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid. hal. 5 [↑](#footnote-ref-9)
9. https://www.academia.edu/7852799/PERKEMBANGAN\_EKONOMI\_KREATIF\_DALAM\_ARUS\_PEMBANGUNAN\_EKONOMI\_MODERN\_Makalah\_Disusun\_Oleh\_PROGRAM\_STUDI\_PENDIDIKAN\_EKONOMI\_FAKULTAS\_PENDIDIKAN\_EKONOMI\_DAN\_BISNISdiakses 30 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-10)
10. https://www.ekon.go.id/berita/print/ekonomi-berbasis-kreativitas.1659.html di akses 12 april2016 [↑](#footnote-ref-11)
11. Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Badan Ekonomi Kreatif merupakan badan yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Semula urusan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Kementerian Pariwasata, Saat ini Kepala Badan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Triawan Munaf [↑](#footnote-ref-12)
12. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\_Ekonomi\_Kreatif di akses pada tanggal 12 Mei [↑](#footnote-ref-13)
13. http://www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-inovasi-kreatif-para-ahli-definisi.html di akses 22 April 2016 [↑](#footnote-ref-14)
14. http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-8-tahun-2016-tentang-komite-ekonomi-dan-industri-nasional/ di akses 22 April 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/07/090760632/kein-industri-harus-punya-keunggulan-kompetitif di akses 22 april 2016 [↑](#footnote-ref-16)
16. Umar Suryadi Bakry, *Pengantar Hubungan Internasional* (Jakarta: Jayabaya University Press, 1999), hlm.1 [↑](#footnote-ref-17)
17. Peter A.Toma and Robert F. Gorman, *International Relatons : Understanding Global Issues* (California: Wadsworth. Inc, 1991), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-18)
18. Teuku M.Rudy, *Teori, etika dan kebijakan hubungan internasional* (Bandung: Agkasa, 1993),hlm.3 [↑](#footnote-ref-19)
19. K.J. Holsti, politik internasional sebagai kerangka analitis (terjemahan wawan juanda) (bandung:bina cipta,1992),hlm.26. [↑](#footnote-ref-20)
20. Teuku May Rudi, Administrasi dan Organisasi Internasional (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal 3. [↑](#footnote-ref-21)
21. Nopirin, Ekonomi Internasional (Yogyakarta: BPFE, 1991), hlm.1 [↑](#footnote-ref-22)
22. Dominick Salvatore, Ekonomi Internasional (Terjemahan Rudi Situmpul) (Jakarta Erlangga, 1984), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-23)
23. Dominick Salvatore, Theory and Problem of International Economy (sanduran Rudi Situmpul) (Jakarta Erlangga, 1986), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-24)
24. R.E.A. Mamoer, Ekonomi Internasional: Suata Pengantar (Bandung: Yayasan Fakultas UNPAD,1974) hlm.1. [↑](#footnote-ref-25)
25. Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional (Terjemahan Wawan Juanda) (Jakarta: Putra A. Bardin,1999),hlm.7. [↑](#footnote-ref-26)
26. K.J. Holsti, Internasional Politic: A framework for Analysis,1981,hlm.175 [↑](#footnote-ref-27)
27. Jack C. Plano dan Roy Olton, Op.cit., hlm.5. [↑](#footnote-ref-28)
28. Kbbi.web.id diakses 27 mei 2016 [↑](#footnote-ref-29)
29. http://www.mpr.go.id//berita/read/2013/11/25/12913/liberalisasi-ekonomi-yang-dikendalikan-negara-bukan-pasar [↑](#footnote-ref-30)
30. Bob Sugeng Handiwita (2002). Politik Bisnis Internasional.Kanisius.Yogyakarta. Hal 60-61 [↑](#footnote-ref-31)
31. Boediono, Perdagangan Internasional (Yogyakarta: BPFE, 1983),hlm.9. [↑](#footnote-ref-32)
32. T. May Rudy, Op.Cit. 103. [↑](#footnote-ref-33)
33. Teuku May Rudi,Op. Cit., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-34)
34. Hang out Mata Kuliah Hubungan Internasional Kawasan [↑](#footnote-ref-35)
35. Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm.17. [↑](#footnote-ref-36)
36. Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.,* hlm 139. [↑](#footnote-ref-37)
37. T. May Rudi, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional (Bandung: Bina Budaya,1993), hlm.119. [↑](#footnote-ref-38)
38. Rina Rosanti, “Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Timur (EAFTA) dan Pengaruhnya Terhadap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Skripsi FISIP-HI Unpas, 2003, hlm.14. [↑](#footnote-ref-39)
39. Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (terjemahan Drs. Haris Munandar, M.A.) (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 137. [↑](#footnote-ref-40)
40. “Makalah Ekspor-Impor”, dalam http://cwegigs.blogspot.com/2010/10/makalah-ekspor-impor.html diakses 4 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-41)
41. http://www.pendidikanekonomi.com/2012/05/defenisi-ilmu-ekonomi-oleh-prof-p.html di akses 30 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-42)
42. Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Terjemahan Drs. Haris Munandar, M.A.) (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-43)
43. Proses multiplier adalah apabila kenaikan dalam pengeluaran, maka akan tercapai tambahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional akan mengalami kenaikan. Kenaikan pengeluaran tersebut adalah sama jumlahnya dengan pertambahan pengeluaran yang baru ini tidaklah sebesar pertambahan pendapatan yang baru diperoleh. Besarnya pengeluaran baru yang akan dilakukan tergantung kepada besarnya kecondongan konsumsi batas yaitu proporsi dari setiap tambahan pendapatan yang akan digunakan untuk konsumsi. (lihat : Sadono Sukirno, 1985: 253). [↑](#footnote-ref-44)
44. http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-fungsi-jenis-distribusi.html di akses 18 April 2016 [↑](#footnote-ref-45)
45. https://coecoesm.wordpress.com/2011/11/28/strategi-distribusi/ di akses 18 April 2016 [↑](#footnote-ref-46)
46. Suryana, ekonomi kreatif, ekonomi baru : mengubah ide dan menciptakan peluang, Jakarta:salemba empat, 2013, hal. 3 [↑](#footnote-ref-47)
47. Ibid. hal. 4 [↑](#footnote-ref-48)
48. Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-49)
49. Mandala harefa, “Kebijakan pembangunan dan kesenjangan antar Daerah”, Makalah, dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku\_tim/buku-tim-16.pdf.diakses 4 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-50)
50. H. Bintoro Tjokroaminoto, Teori dan Perkembangan Strategi. (1990).hlm.23. [↑](#footnote-ref-51)
51. H. Bintoro Tjokroaminoto, Politik Bisnis Internasional (Yogyakarta: Kalisius, 2002),hlm.86. [↑](#footnote-ref-52)
52. Moctar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional (Jakarta:LP3ES,1990),hlm.163. [↑](#footnote-ref-53)
53. “ Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.https://www.bps.go.id/brs/view/id/1267 di akses 18 april 2016 [↑](#footnote-ref-54)